



DISKRIMINASI ETNIS TIONGHOA DI GORONTALO MASA ORDE BARU

Fikriyanto R. Latif¹, Yulan², Andris K. Malae³

¹ Faculty of Social Science, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: fikriyanto01latif@gmail.com

² Faculty of Social Science, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: yyulan111@gmail.com

³ Faculty of Social Science, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: andris.malae91@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

New Era, Discrimination,
Ethnic Chinese, Gorontalo

Kata Kunci:

Orde Baru, Diskriminasi,
Etnis Tionghoa, Gorontalo

How to cite:

Latif, F.R., Yulan., &
Malae, A.K. (2022).
Diskriminasi Etnis
Tionghoa di Gorontalo
Masa Orde Baru. *Jambura
History and Culture
Journal*, 4(2), 11-20.

DOI:

10.37905/jhcj.v4i2.24548

ABSTRACT

The New Order was a gripping order for the ethnic Chinese community, how could they not get different treatment at that time when massive discrimination by the Indonesian government had a major impact in all corners of Indonesia. This discriminatory behavior was caused by several factors, including the occurrence of the "coup" in 1965, because it was suspected that China participated in the Indonesian Communist Party in the "coup" of 1965. After the "coup" in 1965, the situation in the People's Republic of China and Indonesia worsened, which influenced the New Order government's policy towards ethnic Chinese and led to discriminatory behavior. This discrimination occurred in Gorontalo, so that places of worship and schools for Chinese were closed and they were not allowed to perform their traditional ceremonies.

Copyright © 2022 JHCJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia, dihuni oleh orang-orang dari semua kelompok etnis termasuk Cina. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, Indonesia juga memiliki banyak adat. Namun karena banyaknya budaya dan suku bangsa di Indonesia, seringkali terjadi gesekan dan sikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu, terutama sikap diskriminatif masyarakat adat terhadap etnis Tionghoa.¹ Kehidupan masa

¹ Leovandita Eka Jati & Agus Trilaksana. "Undang-Undang Anti Diskriminasi Tionghoa di Indonesia pada Tahun 1998-2008", dalam *Jurnal Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume1, No 2, Mei 2013, hlm 111.

Orde Baru merupakan saat paling mencekam bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Kehidupan tersebut membuat trauma bagi mereka, karena mengalami masa sulit dengan munculnya berbagai tindakan diskriminatif terhadap kehidupan mereka.

Orde Baru merupakan ungkapan bagi masa pemerintahannya Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung sejak di keluarkannya Surat Perintah 11 Maret (supersemar) tahun 1966, hingga 1998 ketika presiden di gantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada masa orde baru, pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang perekonomian namun saat itu juga praktik korupsi merajalela

Tahun 1966 terjadi keadaan tidak tenang pada perpolitikan di Indonesia, yaitu pergantian orde lama ke orde baru. Bersamaan dengan perubahan politik saat itu, pemerintahan orde baru melarang semua kegiatan yang berkaitan dengan Tionghoa. dari keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat masyarakat Tionghoa dihilangkan keadaan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Nomor 14 Tahun 1967.

2. Pembahasan

Imigran Cina datang ke Indonesia sudah lebih dari seratus tahun yang lalu. Pola kedatangan mereka ke Jawa terbentuk kelompok kecil kurang dari lima orang bahkan ada yang datang secara individual. Sampai pada akhir abad ke-18, perempuan Cina sedikit yang ikut dalam perpindahan. Keadaan ini mulai berubah pada abad ke-21 yang menarik para imigran dalam jumlah lebih besar. Daerah asal imigran Cina berasal dari dua provinsi, yaitu Fuhkien (Hokkien) dan Kwantung (Kanton). Orang-orang Cina kemudian menempati daerah Kalimantan Barat, Deli, Bangka, Belitung, Riau dan Jawa.²

² Yuni Maryuni. "Terbukanya Kran Demokrasi Etnis Tionghoa di Indonesia", *dalam Jurnal Pendidikan "Jendela Pengetahuan"* Vol 6, hlm 61.

Orang-orang Tionghoa datang di Nusantara sebagian besar berasal dari provinsi-provinsi Selatan seperti Guangdong, Fujian dan Guangxi. Oleh karena itu, kelompok besar masyarakat Cina perantauan di Asia Tenggara adalah suku-suku Hokkian, Teochiu, Kanton, Hakka Dan Hainan. Dapat dikatakan kelompok-kelompok Tionghoa pendatang ini memiliki sifat yang mampu untuk mempertahankan kepercayaan agama dan budaya mereka. Konfusianisme, Buddhisme dan Taoisme tetapi menjadi acuan hidup mereka meskipun ada di kalangan mereka yang memeluk agama Islam.³

Selama tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mengeluarkan strategi-strategi yang tidak adil terhadap golongan Tionghoa, antara lain “Strategi Benteng” yang menjadi katalisator untuk meluaskan persoalan masyarakat Indonesia, hingga akhirnya melarang pertukaran dan memberikan penginapan kepada golongan Tionghoa provinsi. daerah. Pada pertengahan tahun 1960-an, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan dan membuat kelompok masyarakat Tionghoa menjadi pion dalam permainan catur politik perang dingin. Kerusuhan di perkotaan besar dengan menjadikan kelompok Tionghoa sebagai tujuan mendasar yang terjadi pada tahun 1965/1966. meskipun sebagian besar dari kebrutalan yang menyertainya dikoordinasikan terhadap orang-orang yang dicurigai sosialis. Serangan dan serangan balik yang menguntungkan sosialis dan memusuhi kekuatan sosialis telah menyebabkan gangguan sosial dan politik yang nyata di Indonesia, banyak ahli asing yang salah menilai sebagai pembantaian penduduk Cina. Kesalahpahaman ini mungkin karena pembatasan otoritas publik pada banyak bagian kehidupan dan budaya Tionghoa pada waktu yang hampir bersamaan. Bagian dari budaya Tionghoa yang diumumkan secara ilegal termasuk dramatisasi (bukan film), festival publik, dan pertunjukan karakter Tionghoa. Sambil memeriksa

³ A. Dahana. “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia”, dalam *Jurnal Wacana*, Vol 2, No 1, April 2000, hlm 56.

budaya Tionghoa, ia juga mengirimkan misi untuk mendesak penduduk Tionghoa menggunakan nama-nama lokal.⁴

Diterapkan berbagai kebijakan diskriminatif seperti pelarangan bahasa Mandarin dan festival budaya Tionghoa, akan mengganti nama bernuansa Indonesia, yang menyebabkan munculnya istilah Gana Dipanegara (ganti nama karena di paksa negara); hingga "pembatasan" untuk orang Tionghoa memasuki dunia politik, sipil, dan militer, tentu memberatkan komunitas Tionghoa. Razia orde baru ini membatasi ruang gerak orang-orang etnik Tionghoa hanya pada sektor ekonomi per komersial. Kebijakan-kebijakan utama tersebut justru menjauhkan etnik Tionghoa dari komunitas masyarakat secara luas, dan bahkan menjadi "Outsider".⁵

Etnis Tionghoa datang ke Indonesia karena di sebabkan Negara mereka yang sedang memiliki masalah dengan Negara Jepang dimana saat itu Jepang menyerang Negara Cina sehingga pemerintahan Cina memperbolehkan warganya pergi ke luar negeri hingga terjadi imigrasi besar-besaran dan ada beberapa di antara yang datang ke Indonesia termasuk ke Gorontalo. Kedatangan mereka ke Gorontalo yaitu untuk berdagang dan tentu saja di sambut baik oleh masyarakat di Gorontalo.⁶

Menurut sudut pandang yang tercatat, etnis Tionghoa telah mengalami pemisahan dalam bidang pengajaran dan budaya. Hal ini terjadi pada masa Permintaan Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Secara sah secara resmi pendekatan tersebut tertuang dalam petunjuk resmi (inpres) No. 14 Tahun 1979 yang melarang etnis Tionghoa menyelesaikan latihan seperti acara pujian, menyanyikan melodi Tionghoa, dan melakukan adat Tionghoa untuk seluruh penduduk. Untuk mengendalikan dan menghentikan warisan budaya

⁴ Justian Suhandinata, 2009, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, hlm 13-14.

⁵ Irine Hiraswari Gayatri, Dkk, 2019, *Tionghoa dan Keindonesiaan: Komunitas Tionghoa di Semarang Dan Medan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 3.

⁶ Allen Liando, Wawancara 12 November 2021.

dan pelajaran Tionghoa, otoritas publik juga menutup sekolah Tionghoa di Indonesia yang sering disebut Sekolah Tionghoa. Hal ini mempengaruhi kewibawaan bahasa tersebut, khususnya bahasa Madarin yang dididik di sekolah-sekolah Tionghoa. Jelas, pelarangan ini tidak hanya dirasakan oleh warga keturunan Tionghoa di Gorontalo, namun secara luas berdampak pada warga Tionghoa yang merosot di Indonesia. Dampak selanjutnya adalah kesulitan mendapatkan informasi tentang kelompok masyarakat Tionghoa, baik dari otoritas publik maupun daerah itu sendiri.⁷

Sekolah untuk Cina di Indonesia di tutup namun yang paling tutup penghabisan ada di Kota Gorontalo. Ketika di Jawa pada saat G30S/PKI tahun 1965 di bagian Jawa sekolah sudah di tutup namun di Gorontalo terakhir tutup pada tahun 1996. Tahun 1998 bahkan di Gorontalo hampir tidak terjadi apa-apa, kejadiannya anti Cina itu hanya terjadi di Jawa dan banyak menyebabkan orang Cina mati sampai mereka lari dan dibunuh, di perkosa itu merupakan fakta dan tidak bisa di bantah, Namun baiknya Kejadian tersebut tidak sampai ke Gorontalo. Sifat masyarakat Gorontalo cepat berbaur dengan masyarakat mampu membuat kerukunan di wilayah Gorontalo tanpa memandang Ras dan Agama.⁸ Gorontalo yang penduduknya mayoritas Muslim, tak pernah memiliki konflik dengan agama-agama lain apalagi mendiskriminasi etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa memiliki ikatan yang kuat, karena hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ikatan etnis jauh lebih kuat dibandingkan ikatan agama.⁹

Keadaan berkebangsaan Tionghoa di Indonesia telah mengalami titik tinggi dan titik rendah sejak kerangka waktu perbatasan hingga kerangka waktu reformasi. Pada tahun 1998, tepatnya 13-14 Mei, merupakan hari yang penting bagi etnis Tionghoa di Indonesia mengingat selama dua hari itu terjadi gerombolan massa di Jakarta dan Solo. Sekitar waktu dan tahun yang sama

⁷ Resmiyati Yunus. "Pembauran Etnis Tionghoa dan Gorontalo pada Sektor Ekonomi ditinjau dalam Perspektif Sejarah", *dalam Jurnal Jambura History And Culture Journal*, Vol 1 Issue 1, Januari 2019, hlm 7.

⁸ Lola agnes Moniaga, Wawancara 12 November 2021.

⁹ Abe torangan, Wawancara 20 November 2021.

Suharto diusir. Sejak saat itu orang Tionghoa mulai merasa bahwa mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk mendapatkan tempat yang layak di Indonesia. Orang Tionghoa juga ikut ambil bagian dalam ranah hukum dan berbaur dengan perkumpulan pribumi masa lalu pada masa Permintaan Baru, etnis Tionghoa. tidak diberi ruang untuk dikaitkan dengan bidang politik. Lambat laun individu pribumi mulai berubah ke arah etnis minoritas Tionghoa. Khususnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, mulai memberi tempat bagi etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa diizinkan untuk memuji acara tradisional mereka sekali lagi. Dari 1968-1999, perayaan Tahun Baru Imlek dilarang dipuji secara terbuka. Dengan Instruksi Resmi No. 14 Tahun 1967, sistem Permintaan Baru di bawah Presiden Suharto melarang segala sesuatu yang berbau Tionghoa. Intinya adalah untuk secara efisien dan terus menerus menghapus karakter orang Tionghoa terhadap budaya, termasuk keyakinan dan kebiasaan yang ketat.¹⁰

Di tengah-tengah perpisahan dan cedera yang dapat dibuktikan atas masalah etnis, kaum muda Cina yang terpelajar dan kaya ingin menjadi penting bagi para aktivis yayasan global yang telah menyiapkan kemungkinan dalam ekonomi dan pekerjaan. Ini berdampak kecil pada korespondensi interior pemuda Tiongkok dan kualitas patriotisme. Namun, di Lasem, sebagian besar kaum muda Tionghoa justru terus bergerak untuk menghirup kehidupan baru ke dalam kuil, berurusan dengan pembentukan Tridharma dan asosiasi sosial Hoo Hap Hwee Kwan, yang mempengaruhi orang-orang Tionghoa di Lasem. Karya pemuda Tionghoa di Lasem dapat dilihat dalam rencana Pekan Sosial Perayaan Sanctuary Cu Ang Kiong pada 20 April 2012, yang diikuti oleh 62 Sanctuary di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan hipotetis, penelitian tentang karakter Pemuda Tionghoa Lasem ini adalah untuk memahami sisi berlawanan yang tidak sama dengan pesatnya perkembangan pemuda Tionghoa di Indonesia selama ini yang umumnya akan

¹⁰ Olivia, 2021, *Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 17

cenderung kuliah, bekerja. dan tinggal di luar negeri daripada mengawasi potensi sosial dan mengikuti ikatan sosial di wilayah mereka. sendiri.¹¹

Upacara keagamaan etnis Tionghoa di Gorontalo memang di batasi sampai di tutup sekolah untuk Cina, bahkan ada beberapa yang tidak melanjutkan sekolah, bahkan orang-orang asing lainnya di larang bersekolah pada tahun 1960-an. Bahkan untuk nama saja dari Etnis Tionghoa sudah menyusahkan mereka, tidak hanya menyusahkan mereka bahkan berdagang pun mereka harus mengganti nama-nama toko yang dari nama berbau Cina di ganti menjadi Indonesia. Bahkan sampai ada beberapa masyarakat Tionghoa harus menikahkan anak mereka dengan masyarakat lokal hanya untuk mendapatkan izin usaha berdagang. Semua yang berbau Cina di hilangkan karena merupakan perintah dari Soeharto, sampai akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan dan di ganti oleh BJ. Habibie yang menjabat sekiranya setahun dan di gantikan oleh Gus Dur (Abdurrahman Wahid) larangan-larangan yang di buat oleh Soeharto tersebut di cabut dan semua kembali normal. Etnis Cina kembali menghirup udara segar tanpa adanya larangan-larangan. Bahkan yang tadinya saat perayaan tahun baru Imlek tidak masuk sebagai libur Nasional namun setelah Gus Dur menjadi presiden di tetapkan hari tahun baru Imlek sebagai libur Nasional¹².

Runtuhnya pemerintahan orde Baru pada tahun 1998 memberikan kekuatan yang signifikan terhadap kick-off dari perlengkapan Reorganisasi di Indonesia. Strategi penyerapan yang dilakukan oleh pemerintah Permintaan orde Baru bisa dikatakan telah mengecoh etnis Tionghoa. Oleh karena itu, sejak tumbanganya prakarsa Presiden Suharto, muncul harapan baru bagi golongan Tionghoa. Sejak berakhirnya Masa orde Baru, telah menjadi pintu bagi perubahan pemerintahan yang lebih adil di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan

¹¹ Munawir Aziz. "Identitas Pemuda Tionghoa Pasca Reformasi: Nasionalisme dalam Transformasi Kepemimpinan pada Organisasi Sosial di Lasem, Jawa Tengah", *dalam Jurnal Studi Pemuda*, Vol 2, No 2, September 2013, hlm 118.

¹² Allen Liando, Wawancara 12 November 2021.

di bagian sebelumnya, penyerapan berubah menjadi strategi otoritas selama orde Baru. Meskipun demikian, sejak diperkenalkannya periode perubahan, berbagai strategi yang diberikan oleh otoritas publik tidak menjelaskan satu kata pun tentang "asimilasi" atau "pembaruan".¹³

3. Simpulan

Kedatangan etnis Cina/Tionghoa di Gorontalo dilihat dari latar belakang sejarah tidak terlepas dari peristiwa dalam negeri Mereka adalah Cina sendiri. Ada perang di Cina pada waktu itu, Setiap warga negara wajib menjadi tentara. Akibat kehidupan Ini sangat merepotkan bagi penduduk, dan kemudian beberapa dari mereka menjadi Pendatang yang mencari kehidupan yang lebih baik. Rekaman sejarah Orang Tionghoa yang tinggal di Gorontalo berasal dari Manado dan mereka Ia melarikan diri ke Makassar tanpa menjadi tentara, dan akhirnya terjebak di Gorontalo.

Kebijakan asimilasi Oleh pemerintah yang Berurusan dengan Tionghoa Indonesia Menyebabkan diskriminasi rasial. Pemaksaan keturunan Tionghoa Benamkan diri Anda dalam budaya Indonesia Menyebabkan mereka kalah Kepribadian dan identitas. Sebagai milik Menyatakan bahwa Anda adalah bagian dari negara Indonesia layak Pelaksanaan adat diperlakukan sama dengan suku lain Adat dan agama. Sebagai negara multi-etnis, perbedaannya adalah Realitas yang harus diterima dan dihargai Dan hormat.

¹³Mohammad Zaenal & Retno Winarni. "Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Etnis Tionghoa Di Kota Malang Tahun 1967-2000", dalam *Jurnal Publika Budaya*, Volume 5(2) 2017, hlm 99.

4. Referensi

1. Buku

- Irine Hiraswari Gayatri, dkk., 2019, *Tionghoa dan Keindonesiaan: Komunitas Tionghoa di Semarang Dan Medan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Justian Suhandinata, 2009, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Olivia, 2021, *Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- Cashmore, E. 1996. *Dictionary of Race and Ethnic Relations*. Edisi ke-2. London: Routledge.
- Jahja, J. (peny.) 1991. *Nonpri di Mata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Marshall, T.H. 1950. *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Jurnal

- A. Dahana. "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia", *dalam Jurnal Wacana*, Vol 2, No 1, April 2000
- Leovandita Eka Jati & Agus Trilaksana. "Undang-Undang Anti Diskriminasi Tionghoa di Indonesia pada Tahun 1998-2008", *dalam Jurnal Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume1, No 2, Mei 2013
- Mohammad Zaenal & Retno Winarni. "Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Etnis Tionghoa Di Kota Malang Tahun 1967-2000", *dalam Jurnal Publika Budaya*, Volume 5(2) 2017
- Munawir Aziz. "Identitas Pemuda Tionghoa Pasca Reformasi: Nasionalisme dalam Transformasi Kepemimpinan pada Organisasi Sosial di Lasem, Jawa Tengah", *dalam Jurnal Studi Pemuda*, Vol 2, No 2, September 2013
- Resmiyati Yunus. "Pembauran Etnis Tionghoa dan Gorontalo pada Sektor Ekonomi ditinjau dalam Perspektif Sejarah", *dalam Jurnal Jambura History And Culture Journal*, Vol 1 Issue 1, Januari 2019
- Yuni Maryuni. "Terbukanya Kran Demokrasi Etnis Tionghoa di Indonesia", *dalam Jurnal Pendidikan "Jendela Pengetahuan"* Vol 6

3. Wawancara

Abe Torangan, Kampung Cina Kel. Biawao, 20 November 2021

Allen Liando, Kampung Cina Kel. Biawao, 12 November 2021

Lola Agnes Moniaga, Kampung Cina Kel. Biawao, 12 November 2021